

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM MEMBERDAYAKAN KELOMPOK USAHA
PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) “PADUSI ETNOBOTANI”
DI KAMPUNG BATU BUSUK KELURAHAN LAMBUNG BUKIT
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang



OLEH :

NUR HAZIZAH
NIM 21042183

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Stakeholders Dalam Memberdayakan Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (Kups) “Padusi Etnobotani” Di
Kampung Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang

Nama : Nur Hazizah

TM/NIM : 2021/21042183

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

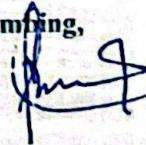
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 Oktober 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

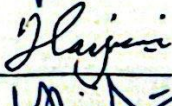
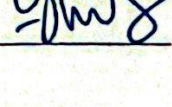
Pada hari Senin, 27 Oktober Pukul 07.00 WIB s/d 08.00 WIB

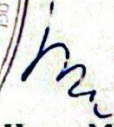
Peran Stakeholders Dalam Memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) "Padusi Etnobotani" Di Kampung Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang

Nama : Nur Hazizah
TM/NIM : 2021/21042183
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 November 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	1. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si	2. 
Anggota	: Yulia Hancselina, S. I.P., M.A.P	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,

Afriya Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hazizah
NIM/TM : 21042183/2021
Prgram Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul **Peran Stakeholders Dalam Memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang** merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawan saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 November 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Hazizah
21042183

ABSTRAK

Nama : Nur Hazizah

**Judul : Peran Stakeholders Dalam Memberdayakan Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu
Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang**

Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang besar, termasuk hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi dan ekologis. Pemanfaatan potensi tersebut diwujudkan melalui program perhutanan sosial yang menekankan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk, Kota Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *stakeholders* dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran Ife dan Tesoriero (2016) yang meliputi empat indikator yaitu asilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling* dari Dinas Kehutanan, Dispora Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit, WRI Indonesia, dan anggota KUPS “Padusi Etnobotani.” Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para *stakeholders* berperan dalam empat aspek utama, yaitu fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Dinas Kehutanan berperan sebagai *policy creator* dan koordinator dalam pembentukan serta penyuluhan kelompok, namun menghadapi kendala partisipasi masyarakat. Dispora Kota Padang berperan sebagai akselerator dalam pengembangan kapasitas pemuda, tetapi belum optimal dalam pelatihan dan promosi produk. Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit berperan sebagai implementer dan koordinator lokal, namun keterlibatannya masih rendah dalam pembinaan administrasi. Sementara itu, WRI berperan aktif sebagai fasilitator dalam pelatihan, pengembangan produk herbal, dan legalisasi kelompok, meskipun terkendala dalam pemasaran produk ke jaringan distribusi yang lebih luas. Faktor pendukung pemberdayaan mencakup potensi sumber daya alam, motivasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan; sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan lanjutan, dan minimnya akses pasar. Secara keseluruhan, keberhasilan pemberdayaan KUPS “Padusi Etnobotani” sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar *stakeholders* dalam memperkuat kapasitas masyarakat serta mengembangkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran *Stakeholders*, Teori Peran, Pemberdayaan, KUPS “Padusi Etnobotani”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *Peran Stakeholders Dalam Menerdayakan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani”* di Kampung Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T.,M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si dan Ibu Yulia Hanoselina, S. I.P, M.A.P selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak Maizaldi selaku Ketua WRI Kota Padang yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Riska Amanda.S.Hut selaku koordinator penyuluh kehutanan UPTD Bukit Barisan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada peneliti.
8. Bapak Ari Prima selaku Kabid kepemudaan Dispora Kota Padang yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada peneliti.
9. Bapak Andi Defriyan, S.H. M.SI selaku Kepala Lurah Lambung Bukit dan seluruh perangkat yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini dan bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Suci Susanti selaku Ketua KUPS beserta dengan seluruh ibu-ibu anggota KUPS yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi yang peneliti butuhkan dan membantu penulis untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

11. Teristimewa kepada Bapak Tia Budi dan Ibu Yarmanila sebagai kedua orang tua tercinta yang menjadi sebuah alasan utama penulis untuk selalu semangat dan pantang menyerah dalam setiap proses yang peneliti jalani selama perkuliahan. Sebagai wujud pertanggungjawaban dan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang sangat luas, dan keikhlasan hati dalam membesarkan dan merawat penulis, dukungan moral dan material, serta doa yang selalu diselipkan dalam sujud untuk penulis selama menempuh pendidikan. Ayah dan Ibu, kebahagiaan dan rasa bangga menjadi tujuan utama dalam hidup penulis sebagai seorang anak. Terima kasih sudah menemani proses dan selalu membuat penulis menjadi orang yang kuat dan lebih baik terus ke depannya. Kasih sayang dan pengorbanan Ayah dan Ibu tidak akan pernah terbalas, tapi insyaallah penulis akan berusaha dan bekerja keras dalam mewujudkan cita-cita. Semua yang penulis lakukan sampai hari ini akan penulis dedikasikan untuk kebahagiaan Ayah dan Ibu.

12. Teruntuk saudara perempuan penulis satu-satunya, Imma Fatul Hasnah, dan saudara laki-laki penulis, Apri Suardi, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran, semangat, serta doa dari kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan studi ini. Semoga kita senantiasa saling mendukung dan saling membantu

dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam setiap perjalanan penulis.

13. Kepada Kakek dan Nenek penulis Ermawati dan Alm. Hendri Susman, Om dan Tante yang sama pentingnya seperti kedua orang tua penulis, yaitu Aulia Fajri, Herwan Radovit, dan Herlina Charisma, terima kasih atas segala dukungan, semangat, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Wahyu Kurnia, sebagai sahabat dan teman penulis terima kasih telah membantu penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas segala dukungan, waktu, serta bantuan yang diberikan, baik secara moral maupun tenaga, sehingga penulis dapat melalui setiap tahap penelitian ini dengan lancar.
15. Kepada karib seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir, yaitu Pitri Andini, Fira, Joya, Vigo, Fazrul, Ori, Riyan, Rido, Syahrul serta semua teman-teman yang telah membantu penulis selama perkuliahan hingga menemani perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan, yang menjadi bagian berharga dalam proses penulis menyelesaikan studi ini.
16. Untuk seorang Abang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi pendengar saat penulis menangis, menjadi guru ketika penulis bertanya, serta selalu memberikan semangat. Semoga di masa depan saat kita kembali bertemu, penulis sudah menjadi perempuan yang sukses dan penuh kebanggaan sebagai seorang adikmu.

17. Terakhir kepada jodoh Nur Hazizah, kelak engkau adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini entah di mana keberadaanmu dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan menjadi milik kita akan tetap menemukan jalannya dengan cara yang paling indah menurut Tuhan. Skripsi ini menjadi bukti semangat dan perjuangan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih pantas, seseorang yang kelak tidak akan menjadi perbandingan dengan siapa pun ketika akhirnya kita dipertemukan. Semoga suatu hari nanti engkau bangga, bukan hanya pada hasilnya, tetapi juga pada setiap proses panjang yang telah penulis lalui hingga sampai di titik ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak Ibu dan rekan rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 19 Oktober 2025

Nur Hazizah
(21042183)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	9
C. PEMBATAAN MASALAH.....	10
D. RUMUSAN MASALAH	11
E. TUJUAN PENELITIAN	11
F. MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB II	14
KAJIAN TEORI	14
A. LANDASAN TEORI	14
B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN	36
C. KERANGKA KONSEPTUAL	42
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43

A. JENIS PENELITIAN	43
B. FOKUS PENELITIAN	43
C. LOKASI PENELITIAN	44
D. INFORMAN PENELITIAN	44
E. JENIS DAN SUMBER DATA	45
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	46
G. TEKNIK PENJAMIN KEABSAHAN DATA	47
H. TEKNIK ANALISIS DATA	48
BAB IV	50
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. TEMUAN UMUM	50
B. TEMUAN KHUSUS	60
C. PEMBAHASAN	99
BAB V	151
PENUTUP	151
A. KESIMPULAN	151
B. SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo “Padusi Etnobotani”	3
--	---

Gambar 1. 2 Produk Teh Sarang Semut.....	3
Gambar 1. 3 Produk Teh Herbal Daun & Akar Ampadu Tanah.....	4
Gambar 1. 4 Produk Ubek Rebus Herbal.....	4
Gambar 4. 1 Peta wilayah Kelurahan Lambung Bukit	50
Gambar 4. 2 Struktur pemerintahan kelurahan Lambung Bukit	52
Gambar 4. 3 Logo KUPS “Padusi Etnobotani”	55
Gambar 4. 4 Produk Teh Sarang Semut.....	57
Gambar 4. 5 Produk Teh Herbal Daun & Akar Ampadu Tanah.....	57
Gambar 4. 6 Produk Ubek Rebus Herbal.....	58
Gambar 4. 7 Dokumentasi Kegiatan Pemuda Pelopor 2024.....	71
Gambar 4. 8 sertifikat izin halal.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Referensi Terdahulu	41
Tabel 3. 1 Data Informan	45
Tabel 4. 1 Data Kependudukan di Kelurahan Lambung Bukit	53
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan di kelurahan Lambung Bukit	54
Tabel 4. 3 Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit	55
Tabel 4. 4 Struktur Organisasi KUPS “Padusi Etnobotani”	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	162
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	166
Lampiran 3 Instument Wawancara	170
Lampiran 4 Instrumen Observasi	173
Lampiran 5 Transkrip Wawancara.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu wilayah dengan potensi alam yang kaya adalah Pulau Sumatera, yang dilintasi oleh Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan ini tidak hanya berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi sumber berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki nilai ekonomi, seperti kayu manis, cengkeh, dan asam kandis. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas hutan Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 25,6 juta hektar, yang menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna serta menyediakan hasil hutan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar (KLHK, 2021). Salah satu kawasan yang mencerminkan kekayaan alam tersebut adalah Kelurahan Lambung Bukit, yang terletak di Kecamatan Pauh.

Kelurahan Lambung Bukit merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah mencapai 38,80 km² dan berada di kaki Bukit Barisan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan BPS Kota Padang pada tahun 2017, jumlah penduduk di kelurahan ini tercatat sebanyak 2.713 jiwa, yang terdiri dari 1.871 laki-laki dan 1.842 perempuan. Sebagian besar penduduk Kelurahan Lambung Bukit bekerja di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, yang mencerminkan ketergantungan masyarakat

terhadap sektor agraris di daerah tersebut (Langgam.id, 2017; Wikimedia Foundation, Inc., 2017). Salah satu daerah yang terletak di Kelurahan Lambung Bukit adalah Kampung Batu Busuk, yang berjarak sekitar 15 km dari pusat Kota Padang. Akses jalan menuju Batu Busuk sebagian besar melewati daerah dengan lereng yang cukup curam. Selain itu, Batu Busuk memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu mencapai 384,88 mm/bulan (BPS, 2022). Kondisi geografis dan aksesibilitas yang menantang ini turut memengaruhi taraf hidup masyarakat di Kampung Batu Busuk.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kampung Batu Busuk tergolong kurang mampu, dengan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan serta obat-obatan medis. Masyarakat setempat jarang mengunjungi puskesmas maupun rumah sakit, dan cenderung enggan mengonsumsi obat-obatan berbahan kimia. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi serta sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Sebagai alternatif, masyarakat memanfaatkan tanaman herbal sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai jenis penyakit yang dialami oleh anggota keluarga. Kebiasaan ini telah membentuk pengetahuan lokal yang cukup luas, terutama di kalangan ibu rumah tangga, mengenai pemanfaatan tanaman herbal sehingga membentuk sebuah kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani”.

Kelompok “Padusi Etnobotani” merupakan kelompok usaha yang anggotanya terdiri dari ibu-ibu yang berdomisili di Kampung Batu Busuk, Kota Padang. Kelompok ini beranggotakan sebanyak 25 orang dan berfokus pada pengelolaan tanaman herbal menjadi produk olahan siap konsumsi.



Gambar 4. 1 Logo “Padusi Etnobotani”

Produk utama yang dikembangkan oleh KUPS “Padusi Etnobotani” adalah teh herbal, yang dapat disajikan dengan cara diseduh. Produk-produk teh herbal tersebut antara lain *Teh Sarang Semut*, *Ubek Rebus Herbal*, serta *Teh Herbal Daun dan Akar Ampadu Tanah*.



Gambar 4. 2 Produk Teh Sarang Semut

Teh Sarang Semut merupakan produk herbal dari tanaman *Myrmecodia spp.* yang hidup menumpang di pohon lain dan dikenal memiliki khasiat medis. Tanaman ini mengandung senyawa metabolit seperti *flavonoid*, *tanin*, dan *tokoferol* yang bersifat

antioksidan dan antiinflamasi, serta berperan melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Teh ini dipercaya membantu mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan pencernaan, dan mengurangi risiko kanker.



Gambar 4. 3 Produk Teh Herbal Daun & Akar Ampadu Tanah

Teh Herbal Daun dan Akar Ampadu Tanah produksi KUPS Padusi Entobotani terbuat dari tanaman tradisional Minangkabau yang dikenal memiliki khasiat menenangkan, meredakan stres, serta membantu kualitas tidur. Akar ampadu tanah kaya akan senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan menurunkan kadar kolesterol, sementara daunnya turut membantu menjaga kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh.



Gambar 4. 4 Produk Ubek Rebus Herbal

Ubek Rebus Herbal produksi KUPS Padusi Entobotani mengandung bahan alami seperti jahe merah, daun puding hitam, dan jeruk yang memiliki khasiat tinggi bagi kesehatan. Jahe membantu meredakan peradangan, daun puding hitam mendukung pencernaan dan detoksifikasi, sedangkan jeruk kaya akan vitamin C yang memperkuat daya tahan tubuh. Kombinasi bahan ini menjadikan ubék rebus efektif meningkatkan kekebalan, mengurangi gejala penyakit, serta memberikan kesegaran dan membantu metabolisme tubuh.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Maret 2025 dengan Bapak Maizaldi selaku Ketua *World Resources Institute* (WRI)

“Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, ditemukan sebanyak 73 jenis tanaman herbal yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Batu Busuk. Dari jumlah tersebut, telah dirumuskan 32 formula obat tradisional berbasis tanaman herbal. Namun demikian, hingga saat ini baru terdapat tiga produk herbal yang berhasil dikembangkan lebih lanjut sebagai produk unggulan, yaitu *Teh Sarang Semut*, *Ubek Rebus Herbal*, dan *Teh Herbal Daun dan Ampadu Tanah*.”

Melihat kondisi tersebut, ada beberapa pihak yang diharapkan bisa berperan untuk memberdayakan kelompok ibu-ibu di Kampung Batu Busuk diantaranya *pertama* Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, Dinas Kehutanan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, yang mencakup perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam rangka mendukung pengembangan perhutanan sosial di Kampung Batu Busuk, Dinas Kehutanan telah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan

memberikan pemahaman mengenai teknik budidaya tanaman herbal dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dibentuklah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” pada bulan Agustus 2023, yang beranggotakan ibu-ibu dari masyarakat setempat. Meskipun demikian, Dinas Kehutanan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan penyuluhan, salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan peserta secara lengkap pada setiap sesi kegiatan.

Kedua, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang. Dispora memiliki peran strategis dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga, termasuk dalam mendukung sektor ekonomi kreatif di kalangan generasi muda. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Adapun fungsi Dispora meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi dinas (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum [JDIH] Kota Padang, 2022). Dalam upaya mendukung ekonomi kreatif, Dispora berperan melalui penyelenggaraan pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek), fasilitasi akses terhadap infrastruktur dan teknologi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreatif, dan media. Salah satu program konkret yang telah dilaksanakan adalah pelatihan branding digitalisasi untuk membekali pelaku usaha muda dalam

memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan pemasaran produk (Padangkita, 2023). Namun implementasinya, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk hingga saat ini belum memperoleh akses terhadap program pelatihan, penyuluhan, maupun promosi produk dari Dispora Kota Padang.

Hal ini didukung dari hasil wawancara penelitian pada tanggal 20 Maret 2025 dengan Ibu Suci Susanti selaku Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk.

”Kelompok ini hanya pernah terlibat dalam program Pemuda Pelopor yang diwakili oleh satu orang peserta, tanpa adanya tindak lanjut berupa pendampingan usaha atau fasilitasi promosi produk di tingkat lokal maupun nasional.”

Ketiga, Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Kelurahan memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, tugas utama kelurahan meliputi pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (PP No. 73 Tahun 2005). Dalam konteks ini, kelurahan berperan dalam mengidentifikasi potensi lokal, memberikan pelatihan, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif (Bina Pemdes Kemendagri, 2005). Selain itu, kelurahan bertanggung jawab membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (JDIH Kota Padang, 2022). Namun, dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah Kelurahan Lambung Bukit dalam mendukung

kegiatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” belum tampak secara nyata. Kepala kelurahan diketahui beberapa kali tidak menghadiri pertemuan yang diadakan bersama *stakeholders* terkait, serta belum melakukan kunjungan langsung ataupun memberikan bantuan yang mendukung pengembangan kelompok tersebut. Ketidakterlibatan ini menunjukkan belum adanya langkah konkret dari pihak kelurahan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui KUPS “Padusi Etnobotani”.

Keempat, World Resources Institute (WRI). WRI merupakan organisasi penelitian independen yang bekerja sama dengan pemerintah, bisnis, lembaga multilateral, dan kelompok masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi praktis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan kelestarian alam di Indonesia. WRI memfokuskan pekerjaannya pada lima isu utama, yaitu hutan dan tata guna lahan, iklim, energi, kota dan transportasi, serta lautan. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga keanekaragaman hayati, serta memitigasi perubahan iklim melalui pengurangan kehilangan hutan dan pemulihan produktivitas lahan yang gundul dan terdegradasi (wri-indonesia.org). Dasar hukum dan legitimasi WRI untuk beroperasi di Indonesia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, yang mengatur kedudukan, fungsi, serta kewenangan yayasan asing dalam menjalankan kegiatan di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah maupun lembaga lokal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2004). Selain

itu, ruang lingkup kerja WRI juga sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang membuka peluang kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pada kenyataannya WRI sudah melakukan perannya dengan melakukan pelatihan mengenai pengelolaan tanaman herbal menjadi berbagai macam produk yang bisa dihasilkan, diantaranya *Teh Sarang Semut*, *Ubek Rebus Herbal*, *Teh Herbal Daun dan Akar Ampadu Tanah*. WRI juga sudah mendaftarkan usaha ibu-ibu KUPS “Padusi Etnobotani” dengan mengeluarkan SK dari UPTD KPHL Bukit Barisan. Namun Namun, pemasaran produk KUPS “Padusi Etnobotani” masih menghadapi kendala yaitu terbatasnya akses ke jaringan distribusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran *Stakeholders* Dalam Memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” Di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang”**

B. Identifikasi Masalah

Dari Beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut :

1. Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit sebagai salah satu *stakeholders* belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani”, ditunjukkan dengan tidak

adanya kunjungan langsung, pembinaan, maupun kehadiran dalam pertemuan bersama *stakeholders* lainnya.

2. Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang sebagai *stakeholders* terkait belum memberikan dukungan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, maupun promosi produk kepada KUPS “Padusi Etnobotani”.
3. Dinas Kehutanan telah memberikan penyuluhan dan membentuk kelompok KUPS “Padusi Etnobotani”, namun masih menghadapi kendala dalam mengumpulkan peserta secara lengkap dalam kegiatan penyuluhan.
4. World Resources Institute (WRI) telah berperan aktif dalam pelatihan dan legalitas kelompok, namun terkendala dalam pemasaran hasil produk herbal KUPS “Padusi Etnobotani” ke jaringan distribusi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka dibataskan dan di fokuskan sebagai berikut:

1. Penelitian mengkaji kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sebagai bagian dari program perhutanan sosial.
2. Penelitian membahas peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas, khususnya dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan promosi produk, terhadap anggota KUPS “Padusi Etnobotani”.

3. Penelitian hanya menelaah keterlibatan Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit dalam mendukung KUPS “Padusi Etnobotani”, khususnya terkait pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan kelompok.
4. Penelitian membatasi kajian terhadap peran *World Resources Institute* (WRI) dalam pengembangan produk dan legalitas kelompok, serta tantangan yang dihadapi dalam memperluas jaringan pemasaran dan distribusi produk herbal KUPS “Padusi Etnobotani”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam memberdayakan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” Di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi *stakeholders* dalam memberdayakan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” Di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)) “Padusi Etnobotani” Di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi *stakeholders* dalam memberdayakan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” Di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan akademik, terutama dalam memahami peran *stakeholders* dalam mendukung kelompok usaha berbasis komunitas. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam implementasi teori di lapangan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi :
 - a. Instansi pemerintah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat bagi *stakeholders* terkait, diantaranya, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Nagari dan *World Resources Institute* (WRI) Indonesia.
 - b. KUPS “Padusi Etnobotani”. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat tentang peran *stakeholders*

dalam memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” Di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat disimpulkan bahwa peran para stakeholders dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dari empat stakeholders yang diteliti, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit, dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, hanya WRI Indonesia yang telah melaksanakan perannya secara optimal sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. WRI Indonesia berperan aktif dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pengembangan produk herbal sebagai hasil hutan bukan kayu. Sementara itu, peran stakeholder pemerintah masih terbatas pada dukungan administratif dan belum berkelanjutan dalam aspek pembinaan, pendanaan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan KUPS.

Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan KUPS “Padusi Etnobotani” dapat dilihat dari potensi sumber daya alam yang melimpah di Kampung Batu Busuk, khususnya tanaman herbal yang bernilai ekonomi tinggi seperti jahe, kunyit, dan serai. Selain itu, semangat kebersamaan dan motivasi anggota KUPS dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan

menjadi kekuatan utama yang mendorong keberlanjutan kelompok. Dukungan dari lembaga non-pemerintah juga menjadi faktor pendorong penting, terutama dalam memberikan transfer pengetahuan dan jaringan kolaboratif yang memperkuat posisi kelompok di tingkat lokal.

Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan KUPS “Padusi Etnobotani” meliputi berbagai kendala yang dihadapi oleh masing-masing stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada terbatasnya anggaran program yang dimiliki oleh Dispora Kota Padang dan Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit, sehingga dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pendamping yang memiliki keahlian teknis juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas kelompok. Tingkat partisipasi anggota KUPS yang belum konsisten turut memperlambat proses pemberdayaan, terutama dalam kegiatan pelatihan dan produksi. Kondisi ini diperberat oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, yang menyebabkan program dari masing-masing stakeholders berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan anggota, kurangnya rasa percaya diri, serta kemandirian yang belum terbentuk secara kuat juga menjadi hambatan internal yang mengurangi efektivitas pemberdayaan.

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2016), peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat mencakup fungsi sebagai *fasilitator, pendamping, pendidik, perencana, dan penghubung sumber daya*.

Dalam konteks penelitian ini, peran tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh seluruh pihak. WRI Indonesia telah melaksanakan sebagian besar peran tersebut, khususnya sebagai *fasilitator* dan *pendidik* melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis bagi anggota KUPS. Namun, Dinas Kehutanan, Dispora Kota Padang, dan Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit belum optimal menjalankan perannya sebagai *pendamping* dan *penghubung sumber daya*, terutama dalam aspek pembinaan berkelanjutan, penyediaan akses permodalan, serta perluasan jaringan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa peran stakeholders dalam proses pemberdayaan KUPS “Padusi Etnobotani” masih bersifat parsial dan belum mencerminkan kolaborasi yang utuh sebagaimana prinsip pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero, yaitu keterlibatan aktif, partisipatif, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi seluruh *stakeholders*, diharapkan tidak hanya sebatas memberikan program pemberdayaan, tetapi juga melakukan pendampingan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui observasi rutin ke lapangan, identifikasi kebutuhan kelompok secara langsung, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala. Dengan langkah ini, program yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi KUPS Padusi Etnobotani.

2. Bagi Dinas Kehutanan, Dispora Kota Padang, dan Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit, diharapkan mampu mengupayakan sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan. Selain mengandalkan anggaran pemerintah, solusi yang dapat ditempuh antara lain menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan (bank/koperasi) yang menawarkan pinjaman berbunga rendah, serta menggandeng sektor swasta melalui program CSR. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi hambatan utama dalam menjalankan program pemberdayaan.
3. Bagi KUPS Padusi Etnobotani, anggota kelompok diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kapasitas diri dengan mengikuti pelatihan tambahan, khususnya di bidang pemasaran digital, pengembangan produk, dan manajemen usaha. Untuk mengatasi partisipasi yang tidak konsisten, kelompok dapat membuat sistem jadwal kerja bergilir dan pembagian tugas yang jelas sehingga setiap anggota memiliki peran yang sama dalam kegiatan kelompok. Selain itu, membangun jejaring dengan komunitas bisnis lokal maupun mitra perguruan tinggi dapat membantu KUPS memperoleh wawasan baru, berbagi pengalaman, serta memperluas peluang pasar.
4. Pengembangan produk menuju skala industri. Produk herbal hasil olahan KUPS “Padusi Etnobotani” memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke arah industri kecil dan menengah (IKM). Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan konkret dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta. Dukungan ini dapat berupa fasilitasi pengadaan

peralatan produksi modern, pendampingan standardisasi mutu, sertifikasi halal dan izin edar BPOM, serta pelatihan pengemasan produk agar memenuhi standar industri. Dengan penguatan aspek kualitas, legalitas, dan pemasaran, produk herbal KUPS berpeluang menjadi komoditas unggulan lokal yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

5. Saran untuk Penelitian Lanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian mengenai efektivitas dan manfaat medis dari produk herbal yang dihasilkan KUPS “Padusi Etnobotani”. Pengujian secara ilmiah terhadap kandungan dan khasiat produk sangat penting untuk memperkuat kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian kesehatan dapat menjadi langkah strategis dalam menguji kualitas bahan baku, manfaat farmakologis, serta keamanan konsumsi produk. Hasil penelitian medis tersebut akan menjadi dasar ilmiah bagi KUPS untuk mengembangkan produk yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki bukti empiris yang dapat menarik minat pasar dan industri kesehatan herbal secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilsyani. (2012). *Sosiologi: Konsep dasar dan Perkembangannya*. Rajawali Pers.
- Anjani, R., Pratama, A., & Ningsih, D. (2024). Partisipasi pemuda dalam program pemberdayaan berbasis komunitas: Faktor pendorong dan penghambat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 12(1), 70–82.
- Anjani, R., Putra, D., & Kurniawan, A. (2024). Partisipasi pemuda dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Pemuda*, 9(1), 70–82.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpppa/article/view/68942>
- Arrozaq, M. (2016). *Peran Stakeholders Dalam Kebijakan Publik*. Penerbit Andi.
- Astuti, W., & Suprpto, B. (2023). Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan berbasis potensi lokal. *Jurnal Media Komunitas*, 8(1), 45–56.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkpm/article/view/49768>
- Chazienul. (2020). *Stakeholders dalam perspektif kebijakan publik*. Prenadamedia Group.
- Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). *Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*. The Johns Hopkins University Press.
- Dierdorff, E. C., Rubin, R. S., & Bachrach, D. G. (2012). Role theory in Management Research. In M. W. Hitt & K. G. Smith (Eds.), *The Oxford Handbook Of Management Theorists* (pp. xx–xx). Oxford University Press.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi.
<https://dishut.jabarprov.go.id>
- Dt. Ma’Ani, K. (2011). Pemberdayaan Masyarakat melalui Teori Actors. *Jurnal Demokrasi*, 12, xx–xx.
- Dushkova, D., Haase, D., & Others. (2024). Community empowerment and capacity transfer in social forestry programs. *Sustainability*, 16(3), 1–16.
<https://doi.org/10.3390/su16031234>
- Eriyanti, F. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Suatu Tinjauan Relevansi Faktor Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Rajawali Pers.
- Fahrezy, J. A., & Eriyanti, F. (2024). Faktor Pendukung dan Penghambat *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Petani Asam Kandis di Nagari Salibutan. *Jurnal ISO*, 4(1), 1–10.
- Fitriana, D., & Wulandari, R. (2022). Peran multipihak dalam penguatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(2), 80–92. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jesp/article/view/60255>

- Fitrianesti, D., & Muhtadi, A. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM). *Jurnal PEMAS*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Gayatri, N. A. P., Warsono, H., & Santoso, S. (2023). Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 98–109.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla*, 1(2), 105–115. <https://doi.org/10.21274/arrehla.v1i2.2021>
- Hafid, M., & Astuti, R. (2022). Ketergantungan masyarakat terhadap pendamping dalam program pemberdayaan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 55–62.
- Hakim, L., & Setyowati, D. (2022). Peran pemerintah kelurahan dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Media Komunitas*, 7(2), 85–95. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkpm/article/view/48217>
- Hardiansyah. (2012). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Hidayat, M., & Saputra, F. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda. *Jurnal Sosial Politik*, 14(2), 40–52. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/15587>
- Hidayat, R., Bahruni, & Trison. (2025). The role of *stakeholders* in managing social forestry business development in FMU South Bandung, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 31(1), 75–92. <https://doi.org/10.7226/jmht.3101>
- Hermana, I., Marwan, D., & Purwanti, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242–248. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i2.145>
- Horoepoetri, I. (2003). *Peran dalam Dinamika Sosial*. LP3ES.
- Iqbal, M. (2007). *Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah*. Bumi Aksara.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irmawati, dkk. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishom, M. (2021). Peran fasilitatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 632, 43–47. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.008>

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Padang. (2022). Peraturan Wali Kota Padang Nomor 130.36/PKS/BKS-PDG/2022 Tahun 2022. <https://jdih.padang.go.id>
- Kalsum, U., Wibowo, A., & Mutmainah, L. (2022). The Role of *stakeholders* in the management of the East Luwuk Mangrove Forest, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 6(1), xx–xx.
- Kasanah, S. N., Nugroho, A. D., & Prabowo, R. (2024). Analysis Of The Role Of *Stakeholders* in The Economic and Social Empowerment Program through the Agrosilvopastura system in Ngasem District, Bojonegoro Regency. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12, 112–122.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Statistik Kehutanan Indonesia tahun 2021*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). Kesatuan Pengelolaan Hutan. <https://kehutanan.go.id>
- Kiki Endah. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*, 6(1), xx–xx. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Kismartini. (2019). *Pengantar Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Kismartini. (2019). Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Kusmedi, H., Haryanto, & Bisjoe, S. (2010). *Manajemen Stakeholders dalam Pengelolaan Proyek*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lesnussa, S. (2019). Tujuan akhir dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial. Penerbit Ilmu Pembangunan, 100–105.
- Lestari, D., & Firmansyah, H. (2023). Peran pendamping dalam meningkatkan kewirausahaan pemuda desa. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 8(2), 85–94.
- Mardikanto, T. (2014). *Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Martínez-Peláez, R., Santos-Roldán, L., & Palos-Sánchez, P. R. (2020). Role of Digital Transformation For Achieving Sustainability: Mediated role of *stakeholders*, key capabilities, and technology. *Sustainability*, 15(14), 11221. <https://doi.org/10.3390/su151411221>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Massiri, A., Mardiatmoko, G., & Rengkung, M. (2024). The role of *stakeholders* and exogenous variables affecting the outcome of social forestry policies in Central Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 129–141. <http://ejournal.aptklhi.org/index.php/jil/article/view/225>

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, I. (2016). Indikator Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 15(2), 123–135.
- Mukti, S., Agustina, A., et al. (2022). Edukasi penggunaan tanaman herbal terhadap pengetahuan pada masyarakat. *Pubmedia Journal Series*.
- Nurfatriani, F., Erwidodo, Tarigan, H., & Perkasa, R. (2023). The role of the social forestry programs in increasing farmers' income and conserving forests in the upstream Citarum watershed, West Java, Indonesia. *International Forestry Review*, 25(2), 211–222. <https://doi.org/10.1505/146554823837244455>
- Nuraini, S., & Sari, D. (2023). Pelatihan kewirausahaan dan digital marketing dalam meningkatkan daya saing usaha pemuda. *Jurnal Kajian Manajemen dan Bisnis*, 12(2), 95–106. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jkmb/article/view/17225>
- Octavia, V. (2023). Integrasi pelatihan teknis dan dukungan modal untuk peningkatan kapasitas kelompok tani. [Informasi publikasi tidak spesifik].
- Pakpahan, H. T., Sirait, N., & Harahap, L. (2024). Konsep Pemberdayaan Masyarakat. CV Hei Publishing Indonesia.
- Padangkita. (2023). Bimtek Branding Digitalisasi Pacu Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Padang. <https://padangkita.com>
- Pratama, R., & Lestari, S. (2022). Keterbatasan anggaran dalam program perhutanan sosial: Implikasi terhadap keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah dan Masyarakat*, 4(2), 135–143. <https://doi.org/10.24815/jpdm.v4i2.25391>
- Putri, M., & Santoso, A. (2023). Kedekatan pemerintah lokal dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan komunitas. *Jurnal Sosial Politik*, 15(1), 70–80. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/16235>
- Rachmawati, E., & Fountain, J. (2020). Role Of External Stakeholders In Tourism Development and Community Empowerment. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 4(1), 25–36.
- Rahayu, S., et al. (2024). The role of local governments in supporting social forestry implementation in Indonesia: A social network analysis and evidence from Eastern Indonesia. *Forest and Society*, 8(1), 1–15. <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/fs/article/view/28524>
- Rahmadani, N., Putra, H., & Lestari, D. (2023). Keterbatasan fasilitas teknis dalam pengembangan usaha perhutanan sosial. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 85–94.

- Rahmawati, N., Hidayat, A., & Puspitasari, E. (2024). Pemanfaatan sumber daya lokal dalam penguatan kelompok usaha perhutanan sosial. *Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 15(1), 60–72. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpasca/article/view/32859>
- Ramli, A., Afiq, A., & Triwanto, A. (2025). Community welfare and forest sustainability in social forestry programs: A case study of KTH Bhakti Alam Lestari in Malang, East Java. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 12(1), 13–26. <https://ejournal.aptklhi.org/index.php/ijfr/article/view/162>
- Ramli, R., Riski, A. N., & Chanan, M. (2024). Enhancing tenure security: A case study of the social forestry scheme in the State Forestry Corporation, Malang District, East Java. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(1), 43–56. <https://journal.ugm.ac.id/v3/jik/article/view/8616>
- Safrida, S., Rahmat, M., & Harahap, M. S. (2022). Peran *Stakeholders* Sebagai Aktor kebijakan dalam Pemberdayaan Kelompok Perempuan "Sepakat" Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 10(2), xx–xx.
- Setiawan, I. (2020). *Analisis Stakeholders dalam Perencanaan Pembangunan*. Kencana.
- Satria, A. (2021). Kebijakan perhutanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(1), 110–120. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/37874>
- Sirimorok, N. (2024). Commoning and institutional strengthening in social forestry. *Journal of Forest and Society*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.24259/jfs.v8i1.2024>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Srihardian, T., Putri, Y., & Sasmita, D. (2022). Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial Di Daerah. *Jurnal JISIPOL*, 6(1), 107–121.
- Sulastri, L., & Rahayu, T. (2025). Jejaring kolaboratif dan penyediaan fasilitas Dispora dalam penguatan kewirausahaan pemuda. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan*, 7(1), 60–72. <https://journal.uns.ac.id/jpp/article/view/43562>
- Susanti, W., & Yuliana, R. (2024). Kapasitas pemasaran digital dalam usaha komunitas berbasis produk lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 70–78.

- Suryani, T., & Pratama, R. (2021). Legitimasi kelembagaan dalam penguatan kelompok masyarakat desa. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(2), 110–123. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/38852>
- Suhardono, E. (2016). *Teori peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, & Agus Raharjo. (2013). Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2(8), 1–7. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr>
- Tamrin, M. H. (2023). Pengelolaan KEE Ujung Pangkah Melalui Kolaborasi Stakeholders. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Vandenberghe, C., Panaccio, A., & Ayed, A. K. B. (2017). Time and The Psychological Contract: A longitudinal study. *Journal of Vocational Behavior*, 103, 2092–2104.
- Vandenberghe, F., Hollstein, B., & Joas, H. (2017). The Role Set Revisited: Roles, Careers and Institutions In A Neostructural Sociology. *Current Sociology*, 65(2), 2089–2108.
- Wahyudi, A., & Kurniasih, E. (2021). Peran penyuluh kehutanan dalam meningkatkan kualitas perhutanan sosial. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(3), 130–140.
- Wakka, A. (2013). *Manajemen Stakeholders dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Graha Ilmu.
- Wehner, L. E., & Thies, C. G. (2021). Leader Influence In Role Selection Choices. *International Studies Review*, 23(4), 1424–1441. <https://doi.org/10.1093/isr/viab014>
- Wibowo, A., Kalsum, U., & Ma'ruf, M. (2024). Community Empowerment Through Strengthening Social Capital and The Role Of Stakeholders In The Development Of tourism Villages In Karanganyar Regency. *Jurnal Penyuluhan*, 20(1), 148–164.
- World Resources Institute (WRI) Indonesia. (2022–2023). *Laporan Tahunan WRI Indonesia*. Jakarta: WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/publikasi/laporan-tahunan>
- Yuliani, E., Ramadhan, H., & Susanti, W. (2012). *Sosiologi: Konsep dasar dan Perkembangannya*. Rajawali Pers.